
MANAJEMEN PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) MADU PADA KELOMPOK TANI MADU ALAM SO LOMPA WILAYAH BALAI KPH TAMBORA

Abdul Najib¹, Hardian Reza Dharmayanda², Ahmad Yamin³
Universitas Teknologi Sumbawa^{1,2,3}
Corresponden Author : *abdul.najib1980@gmail.com*

Abstrak

Pemanfaatan HHBK dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada hasil hutan kayu, meningkatkan pendapatan masyarakat hutan dari HHBK dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pelestarian ekosistem kawasan hutan melalui pengelolaan HHBK secara lestari sedangkan tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pengelolaan HHBK Madu serta mengetahui dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat pengelolaan HHBK Madu di Balai KPH Tambora. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan beberapa teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi Pustaka. Analisa Data dengan menggunakan analisis SWOT. Subyek penelitian ini adalah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tambora, Unsur Pemerintah Desa, Ketua Bumdes Mekarsari, Mandor Pendamping Kelompok Tani dan Ketua Kelompok Tani So Lompa.

Hasil penelitian adalah bahwa 1). Manajemen pengelolaan Hasil hutan bukan kayu (HHBK) Madu di wilayah Balai KPH Tambora dilakukan melalui program Kemitraan Kehutanan sesuai ketentuan Peraturan Menteri LHK No.83/Menlhk/setjen/kum.1/10/2016 tentang perhutanan sosial dengan skema Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan analisis SWOT diketahui Faktor pendukung dari Manajemen pengelolaan HHBK Madu adalah terjalinnya pola kemitraan antara KPH dengan Masyarakat dengan memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat yang mengelola HHBK Madu sehingga ekonomi masyarakat meningkat dan terbantunya KPH dalam menjaga kelestarian hutan, sedangkan faktor penghambatnya adalah dinamika perubahan kebijakan pengelolaan hutan, Daya saing nilai produk, serta komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun program kemitraan yang lebih ke arah pertanian, dan adanya pihak-pihak yang kontra dalam pengelolaan HHBK.

Berdasarkan hasil analisis berbagai alternatif strategi untuk peningkatan kinerja dalam implementasi program kemitraan di Desa Piong, diarahkan pada pengoptimalan program kemitraan itu sendiri untuk mengelola dan meningkatkan jenis potensi sumberdaya yang ada guna mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat pada program kemitraan kehutanan melalui pelatihan dan pemberian bekal keterampilan serta peningkatan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan HHBK Madu.

Kata Kunci : Manajemen Pengelolaan HHBK, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

Utilization of NTFPs is intended to reduce dependence on timber forest products, increase forest community income from NTFPs and raise public awareness of the conservation of forest area ecosystems through sustainable management of NTFPs. as well as obstacles to the management of NTFPs for Honey at the Tambora KPH Hall

This study uses a qualitative research approach, with several data collection techniques in the form of interviews, observations and literature studies. Data analysis using SWOT analysis. The subjects of this study were the Tambora Forest Management Unit Center (BKPH), Village Government Elements, Head of the Mekarsari Bumdes, Farmer Group Assistance Foreman and So Lompa Farmer Group Head.

The results of the study are that 1). Management of non-timber forest product (NTFP) Honey in the Tambora KPH Balai area is carried out through the Forestry Partnership program in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 83/Menlhk/setjen/kum.1/10/2016 concerning social forestry with the Community Empowerment scheme in accordance with the provisions of the Minister of Forestry No. P.39/Menhut-II/2013 concerning Community Empowerment. Based on the SWOT analysis, it is known that the supporting factors for the management of NTFPs are the establishment of a partnership pattern between the FMU and the community by providing protection and recognition to the community who manages NTFPs so that the community's economy increases and the FMU is assisted in maintaining forest sustainability, while the inhibiting factor is the dynamics of changes in management policies. forest, product value competitiveness, as well as the commitment of the Regional Government in building a partnership program that is more towards agriculture, and the existence of opposing parties in the management of NTFPs.

Based on the results of the analysis of various alternative strategies for improving performance in the implementation of the partnership program in Piong Village, it is directed at optimizing the partnership program itself to manage and increase the types of potential resources available in order to get maximum results. By strengthening institutions and strengthening community capacity in forestry partnership programs through training and provision of skills as well as increasing cooperation with other parties for the development of NTFPs.

Keywords: *NTFPs Management, Partnership, Community Empowerment.*

A. PENDAHULUAN

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) sudah tegas mengatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Pembangunan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, diarahkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, obat-obatan dan hasil hutan bukan kayu bagi keluarga. Bagi masyarakat modern hutan memiliki berbagai macam fungsi yakni fungsi ekonomi, perlindungan dan keindahan. (Hidayat, 2015).

Keberadaan sumber daya hutan selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan, walaupun secara Nasional telah dapat memberikan masukan devisa bagi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional, namun juga perlu diperhatikan bahwa kondisi hutan kita sekarang sudah berubah fungsi dan manfaatnya, hal ini disebabkan karena kecerobohan dan kerakusan kita khususnya di dalam pengelolaan dan pemeliharannya, sehingga banyak menimbulkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang akhirnya akan berakibat kepada rusaknya lingkungan dan juga kelestarian hutan itu sendiri lebih dari empat dekade sistim pengelolaan hutan di Indonesia berorientasi pada kegiatan penguasaan hutan (Ngadiono, 2004).

Balai KPH Tambora sebagai unit pengelolaan hutan terkecil ditingkat tapak juga memiliki peranan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hasil hutan bukan kayu, yang dapat dimanfaatkan serta dikelola bersama masyarakat sekitar hutan.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu madu hutan di Desa Piong Kec. Sanggar Kab. Bima Provinsi NTB sudah

dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan Tambora, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan pemanenan dan pengusahaan hasil hutan bukan kayu madu mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu hasil hutan bukan kayu yang dikenal oleh masyarakat Desa Piong adalah madu. Madu digunakan oleh masyarakat Desa Piong untuk berbagai keperluan hidup sehari-hari serta dijual sebagai sumber penghasilan. Madu hutan dihasilkan oleh lebah madu *Apis dorsata* yang masih bersifat liar dan ganas dan biasanya bersarang di pohon-pohon jenis tertentu yang disebut pohon Owo (*Ficus albipila*) yang selama ini diproduksi dan dikelola oleh masyarakat Desa Piong dengan cara tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan HHBK Madu di wilayah Balai KPH Tambora?
2. Apa saja faktor pendukung serta penghambat pengelolaan HHBK Madu di wilayah Balai KPH Tambora?

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan HHBK Madu di Balai KPH Tambora?
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung serta penghambat pengelolaan HHBK Madu di Balai KPH Tambora?

B. LANDASAN TEORI

Manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan menggendakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. *Henry Fayol (2013), General Industrial Management* .

Menurut Handoko (2012) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Siswanto (2014)

mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Terry dalam Nawawi (2011:54), ada empat fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengarahan (*actuating*), dan fungsi pengendalian (*controlling*) Dibawah ini akan dijelaskan arti atau pengertian masing-masing fungsi manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*):

- a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
- b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)
Pengorganisasian merupakan pengumpulan kegiatan yang diperlukan, yaitu menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.
- c. Fungsi Pengarahan (*Actuating*)
Pengarahan yaitu usaha menggerakkan anggota-anggota organisasi atau perusahaan sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan secara maksimal.
- d. Fungsi Pengendalian (*Controlling*)
Pengendalian dapat diartikan sebagai proses penentuan apa yang dicapai, pengukuran, dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Konsep Manajemen Pengelolaan hutan adalah penggunaan cara-cara manajemen dan teknis-teknis kehutanan dalam menjalankan aktivitas terhadap suatu areal hutan. Manajemen Hutan adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (POAC)

kegiatan yang berkaitan dengan hutan. Masyarakat Rimbawan Amerika (*Society of American Forester*) mendefinisikan "forest management" atau manajemen hutan dengan "Penerapan metodologi bisnis dan teknologi kehutanan dalam kegiatan yang berhubungan dengan hutan". Manajemen Hutan adalah upaya untuk membangun dan memelihara hutan dengan tujuan mendapatkan manfaat atau keuntungan sebesar-besarnya secara lestari. Aspek-aspek yang diperhitungkan dalam manajemen hutan meliputi aspek perusahaan, aspek sosial dan aspek teknologi. (Rujehan, 2021).

1. Aspek perusahaan mencakup ekonomi, organisasi dan administrasi, keuangan, akuntansi, statistik, pemasaran dan peraturan perundangan-undangan.
2. Aspek sosial mencakup kesempatan kerja, perumahan, politik dan ilmu-ilmu sosial.
3. Aspek teknologi mencakup silvikultur, pemanenan, teknologi hasil hutan, metode pencegahan/pemberantasan hama dan penyakit, metode pengendalian bencana alam, pengurusan/perlindungan rekreasi, pengaturan pengembalaan, hidrologi dan teknik sipil.

Aspek yang menonjol dalam manajemen hutan tertentu tergantung pada fungsi hutan yang bersangkutan, dikaitkan dengan tujuan manajemen dan keadaan sosial-ekonomi setempat. Manajemen hutan produksi berlainan dengan manajemen hutan lindung, demikian pula manajemen hutan di daerah berpenduduk padat, berlainan dengan manajemen hutan di daerah berpenduduk jarang; juga manajemen hutan untuk tujuan kayu untuk kebutuhan industri berlainan dengan manajemen hutan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan.

C. METODE

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan alat

bantu seperti pedoman wawancara atau juga dengan menggunakan rekaman suara dan video atau juga dengan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya.

2. Pengumpulan data sekunder (dokumen) :

Berdasarkan sumbernya, data sekunder dikumpulkan dengan cara luring dan daring

a. Pencarian secara luring. Data dari internal dari database Kantor Desa, BKPH Tambora dan Kecamatan Sanggar.

b. Pencarian secara daring. Data dari database yang terdapat pada internet dimana menyediakan informasi tentang topik penelitian yang sedang dilakukan, seperti jurnal-jurnal, artikel, dan pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan topik permasalahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada suatu objek yang diteliti. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kejadian yang akan diteliti. Sugiyono (2005) berpendapat bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. (Gunawan, 2013). Dari wawancara ini, peneliti akan memperoleh informasi spontan dan mendalam dari setiap informans

Dalam wawancara, peneliti menetapkan dimulai dari struktural tertinggi hingga bawah guna mendapatkan informasi, Di mana peneliti memulai dari informan kunci, yaitu Kepala Balai KPH Tambora,

Kepala Desa Piong dan Anggota Kelompok Tani So Lompa dengan memberikan masing-masing 4 s/d 5 pertanyaan, dimana peneliti mendapatkan informasi detail dalam mencari datanya, dan ditambah informan pendukung yang bisa diarahkan oleh informan kunci demi mendukung hasil dari informasi kunci

3. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku atau bahan-bahan rujukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu data pokok diambil langsung diambil dari informan dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Wawancara Kepada Anggota Kelompok Tani So Lompa selaku kelompok kemitraan, Unsur Balai KPH Tambora selaku pengelola kawasan hutan dan Kepala Desa selaku unsur pemerintah, data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh berbagai sumber dan literatur sebagai pendukung dalam penelitian ini berasal dari database Kantor Desa Piong, Balai KPH Tambora dan berbagai literatur pendukung.

Penelitian ini menggunakan Analisis SWOT, dimana teori analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah Strengths atau Kekuatan, W adalah Weakness atau Kelemahan, O adalah Opportunity atau Kesempatan, dan T adalah Threat atau Ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh, program kerja (Rangkuti, 2003).

Menurut Rangkuti (2003), SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan

(*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan HHBK Madu pada Balai KPH Tambora dilakukan melalui program Kemitraan Kehutanan sesuai ketentuan Peraturan Menteri LHK No. 83/Menlhk/setjen/kum.1/10/2016 tentang perhutanan sosial dengan skema Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya, untuk memberikan akses legal serta keamanan pada petani pengelola madu hutan kami melalui Dinas LHK Prov. NTB telah menetapkan Penunjukan Desa Piong sebagai mitra kehutanan didasarkan pada Naskah Kerjasama Kemitraan Kehutanan Nomor 522/785/SKRT-DLHK/2018 tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Madu. Kerja sama di bawah naungan BUMDES Mekar Sari Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jangka waktu perjanjian selama 10 tahun dan di evaluasi setiap 5 tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kemitraan tersebut membentuk kerjasama kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar kehutanan berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu jenis Madu, sehingga diperoleh manfaat kawasan hutan yang optimal bagi masyarakat melalui BUMDes dan kelestarian hutan tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan kemitraan Balai KPH Tambora telah melakukan serta membantu dalam beberapa aspek.

1. Menjamin keberlangsungan usaha pemanfaatan HHBK madu dan melaksanakan pengelolaan kawasan yang mempertahankan ekosistem hutan.

2. Memfasilitasi sarana dan prasarana usaha pengembangan HHBK madu.
3. Fasilitasi pasar dan meningkatkan mutu produk.
4. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada BUMDes dan kelompok madu sebagai mitra.
5. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian.
6. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016.ke mitraan merupakan solusi untuk meningkatkan kesempatan petani kecil dalam Perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan adalah salah satu dari 5 skema perhutanan sosial. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wajib melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan.

Hasil hutan bukan kayu telah berperan penting dalam membuka kesempatan kerja bagi anggota masyarakat di sekitar hutan dan merupakan komoditi perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat (Djajapertjanda dan Sumardjani, 2001).

Sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat KPH Tamborajuga telah melakukan proses pemberdayaan, karena pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberadaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dankemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembangunan kehutanan harus lebih menitikberatkan pada upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal ini disebabkan masyarakat desa yang hidup dan bertempat tinggal sejak lama di dalam dan di sekitar hutan mempunyai hubungan interaksi dan ketergantungan yang sangat erat dengan hutan serta sumberdaya yang ada di dalamnya, termasuk aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi dan bahkan aspek religius (Harlen, 2010).

Maksud pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau kesatuan pengelolaan hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Kedudukan masyarakat dalam pengaturan pemanfaatan HHHK sudah diatur dalam peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang dasar 1945 sampai pada peraturan yang mengatur implementasi di lapangan berisi pemberian akses kepada masyarakat di dalam zona yang telah ditentukan. Akses dalam pemanfaatan SDA pada zona tradisional merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam.

Penunjukan Desa Piong sebagai mitra kehutanan didasarkan pada Naskah Kerjasama Kemitraan Kehutanan Nomor 522/785/SKRT-DLHK/2018 tentang

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Madu. Kerja sama di bawah naungan BUMDES Mekar Sari Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana Kemitraan ini dijadikan sebagai salah satu solusi dari konflik lahan antara masyarakat KPH Tambora dan sekaligus upaya rehabilitasi hutan serta pemberian akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani hutan, dalam proses kesepahaman dan perjanjian antara masyarakat dan KPH Tambora dalam membuat rencana kerja organisasi, termasuk rencana kerja umum, rencana kerja tahunan, melakukan pendataan potensi kawasan, serta mempersiapkan persyaratan-persyaratan kelengkapan dan draf kesepakatan/MOU, dalam program kemitraan kehutanan dalam pengelolaan madu hutan terdiri :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora
2. Pemerintah Desa Piong
3. Bumdes mekarsari

Keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Asumsinya, stakeholder merupakan pihak yang terlibat langsung dan mengetahui apa yang menjadi kepentingannya dari kebijakan itu (Rusli, 2013:22).

Keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan ditentukan oleh berfungsinya sebuah lembaga yang dibangun, berjalannya aturan yang dibuat dan sepakati bersama stakeholder dan para stakeholder menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya (Zubayr et al., 2014).

Untuk mendukung program kemitraan kehutanan Balai KPH Tambora bersama Pihak Desa Piong serta Masyarakat petani hutan aktif melakukan pengamanan, Penanaman untuk menambah pakan lebah serta pemeliharaan rumah madu so lompa dan kegiatan kegiatan lainnya sebagai berikut :

1. Melakukan patroli secara bersama karena dengan adanya pemanfaatan lahan untuk areal penanaman jagung yang cenderung menggunakan pola pembakaran lahan serta penggunaan pestisida akan dapat merusak ekosistem lebah madu.
2. Mengendalikan kebakaran hutan dan lahan didalam dan di sekitar areal rumah madu KPH Tambora.
3. Melakukan pembinaan pada masyarakat sekitar hutan untuk menjaga ekosistem kawasan hutan Tambora.
4. Mendorong budidaya serta penanaman jenis tanaman pakan dan pohon sarang disekitar areal rumah madu.

Kolaborasi kerjasama pengelolaan hutan tersebut sebagai wujud dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan. Har Tillar (Rafi et al., 2020:93) mengatakan partisipasi masyarakat sebagai perwujudan dari peningkatan demokrasi melalui sistem yang sudah terdesentralisasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dari sebuah kebijakan atau program.

Mendukung hasil wawancara dengan para informan bahwa untuk peningkatan SDM dalam pengelolaan HHBK diwilayah Balai KPH Tambora bersama kelompok tani hutan So Lompa perlu adanya dukungan pelatihan-pelatihan sebagai berikut :

1. Pelatihan pengelolaan HHBK Madu
2. Pelatihan Pengemasan/Pasca panen HHBK Madu
3. Pelatihan Pemasaran serta Akses Pasar HHBK Madu

Pramudyo (2007) menjelaskan pelatihan merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja orang dalam melakukan pekerjaannya. Proses pelatihan mengacu kepada suatu perubahan yang harus terjadi pada peserta pelatihan. Dalam proses pelatihan, kinerja yang kurang baik dibenahi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik. Sehingga sekumpulan tugas yang telah menanti dapat dikerjakan

dengan baik oleh pekerja yang telah mengikuti pelatihan.

Dessler (2006) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Pada kegiatan ini pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pelaku usaha produk HHBK.

Dalam pengelolaan HHBK Madu dikawasan hutan Tambora KPH Tambora juga terus melakukan upaya-upaya untuk pengembangan program kemitraan kehutanan ini melalui kegiatan-kegiatan :

1. Memberikan bantuan sarana prasarana pengelolaan madu kepada kelompok tani madu.
2. Pembentukan asosiasi/koperasi kelompok tani madu KPH Tambora.
3. Meningkatkan peran KPH Tambora sebagai Unit pengelola dan pembina masyarakat.
4. Memberikan peran kepada Dinas yang membidangi Pariwisata untuk turut serta dalam kegiatan promosi.serta peran kepada Dinas yang membidangi Kesehatan terkait produk.
5. Memberikan pelatihan teknik pengumpulan madu hutan secara lestari, Memberikan pelatihan budidaya madu, pelatihan teknologi pengemasan, dan sarana pemasaran (etalase pemasaran madu).
6. Mengikuti event pameran-pameran.

Dalam proses pemasaran kelompok tani HHBK madu di Desa Piong Kecamatan Sanggar masih belum menembus pasar Nasional dan masih dilaksanakan secara local, berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok tani bahwa kesulitan dalam pemasaran karena terbatasnya akses promosi dan pengemasan produk yang masih sederhana.

Nuryanti dan Rahma (2008) menjelaskan pemasaran adalah suatu proses sosial dan melalui proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan memperhatikan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lain. Teknik pemasaran dengan membuat strategi pemasaran yang efektif

dan efisien diharapkan mampu memperluas jangkauan dari pemasaran produk.

. Perhutanan Sosial yaitu adalah sebuah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam sebuah kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan suatu kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial).

Menurut ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 23, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Untuk itu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sangat potensial dilakukan melalui pengelolaan suatu kawasan dalam upaya peningkatan pendapatan dengan menerapkan prinsip kelestarian dan tetap memperhatikan fungsi hutan.

Berdasarkan hasil Penelitian pada faktor Pendukung diperoleh kekuatan, yaitu : Potensi HHBK Madu yang banyak, Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap petani HHBK, Terbantunya KPH dalam menjaga kelestarian hutan, Kondisi ekonomi Petani HHBK meningkat dengan peluang yaitu : Potensi dan tata kelola kawasan terdeteksi dengan jelas untuk dilakukan pengembangan HHBK Madu, Peningkatan kerjasama dengan pihak lain, Sebagai tempat pembelajaran tentang kemitraan HHBK Madu , Manfaat produk yang dirasakan oleh petani.

Sedangkan faktor Penghambat diperoleh kelemahannya ialah kemampuan SDM masih kurang, kurangnya partisipasi sebagian masyarakat, produk yang dihasilkan belum memiliki pemasaran yang mandiri, kurangnya dukungan dari pemerintah

daerah. dengan ancamannya ialah : dinamika perubahan kebijakan pengelolaan hutan, Daya saing nilai produk, komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun program kemitraan, dan adanya pihak-pihak yang kontra dan konflik internal dalam pengelolaan HHBK.

Dengan penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat pada program kemitraan kehutanan melalui pelatihan dan pemberian bekal keterampilan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengembangan produksi HHBK Madu serta peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya untuk mendukung program kemitraan tersebut.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen pengelolaan Hasil hutan bukan kayu (HHBK) Madu di wilayah Balai KPH Tambora dilakukan melalui program Kemitraan Kehutanan sesuai ketentuan Peraturan Menteri LHK No. 83/Menlhk/setjen/kum.1/10/2016 tentang perhutanan sosial dengan skema Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan berdasarkan analisis SWOT diketahui Faktor pendukung dari Manajemen pengelolaan HHBK Madu adalah terjalinnya pola kemitraan antara KPH dengan Masyarakat dengan memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat yang mengelola HHBK Madu sehingga ekonomi masyarakat meningkat dan terbantunya KPH dalam menjaga kelestarian hutan, sedangkan faktor penghambatnya adalah dinamika perubahan kebijakan pengelolaan hutan, Daya saing nilai produk, serta komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun program kemitraan yang lebih ke arah pertanian, dan adanya pihak-pihak yang kontra dalam pengelolaan HHBK

Sehubungan dengan pengelolaan HHBK Madu di Kawasan Hutan Tambora disampaikan saran kepada Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk

menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan sinkronisasi kebijakan yang berhubungan dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk mengakselerasi program perbaikan tata kelola HHBK Madu Tambora sehingga HHBK Madu Tambora menjadi salah satu Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing, sedangkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk konsisten dengan kebijakan pengelolaan perhutanan sosial, serta dapat terus berinovasi dan meminimalisir terjadinya konflik dalam pengelolaan hutan..

DAFTAR RUJUKAN

- Djajapertjunda., S dan Sumardjani. 2001. *Hasil Hutan Non Kayu*. Makalah untuk Kongres Kehutanan III. Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE.
- Henry Fayol, 2013, *General Industrial Management*, Maartino Publishing.
- Hidayat, 2015, *Pengelolaan Hutan Lestari Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, Pustaka Obor. Jakarta.
- Ngadiono. (2004). 35 tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan Prospek. Bogor: Yayasan Adi Sanggoro.
- Nuryanti L, B., & Rahman Y, A. 2008. Pengaruh Variasi dan Kemasan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Teh Kotak Ultrajaya. *Jurnal Strategic*, 7 (14).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, Perhutanan sosial
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 39 / Menhut – II / 2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan
- Pramudyo, Chrisogonus. D. 2007. *Cara Pinter Jadi Trainer*. Jakarta : Percetakan Galang Press.
- Rafi, M., Pribadi, U., & Rahmanto, F. (2020). Factors that Affect Deliberation of Maguwoharjo Village Development Planning Sub-District Depok Regency Sleman Yogyakarta. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 91–101. <https://doi.org/10.35967/jipn>.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Halim Publishing. Bandung.
- Rujehan, 2021, *Pengantar Manajemen Hutan*. Universitas Mulawarman, Samarinda
- Siswanto, H.B. 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Zubayr, M., Darusman, D., Nugroho, B., & Nurrohmat, D.R. (2014). *Peranan para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 239–259. Bogor.